

Kurikulum Merdeka: Peluang dan Tantangannya Bagi Pendidikan Islam di Indonesia

Muh. Haikal Nur Fikri*, Syamsul Arifin, Syarifudin

Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Jurusan Pendidikan agama islam, Universitas Islam Negeri Mataram, Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83116. Indonesia

*Corresponding Author: 250401012mhs@uinmataram.ac.id

Article History

Received : June 16th, 2026

Revised : July 23th, 2026

Accepted : August 01th, 2026

Abstract: Implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia membawa gelombang transformasi yang secara regulatif turut menyasar lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peluang strategis dan tantangan sistemik yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam (madrasah dan pesantren) dalam menyongsong kebijakan kurikulum baru tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) melalui teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap regulasi resmi pemerintah dan artikel jurnal ilmiah bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka membuka peluang emas bagi reposisi metodologi pendidikan Islam yang lebih humanis melalui pembelajaran berdiferensiasi dan internalisasi moderasi beragama dalam P5RA, namun dihadapkan pada tantangan disparitas kesiapan pedagogis guru serta *overloaded curriculum*. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan transisi kurikulum memerlukan strategi akomodasi selektif-inovatif dengan memanfaatkan fleksibilitas struktur kurikulum untuk merampingkan materi keagamaan tanpa mereduksi identitas keislaman.

Keywords: Kurikulum Merdeka, P5RA, Pendidikan Islam.

PENDAHULUAN

Transformasi kurikulum di Indonesia selalu menjadi langkah strategis pemerintah dalam merespons dinamika zaman dan meningkatkan mutu sumber daya manusia. Kebijakan terbaru yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu Kurikulum Merdeka, dirancang untuk memberikan fleksibilitas, fokus pada materi esensial, serta pengembangan karakter melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) (BSKAP Kemendikbudristek, 2022). Orientasi utama kurikulum ini adalah memerdekakan lembaga pendidikan, pendidik, dan peserta didik dari kekakuan administratif, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lebih adaptif dan berpusat pada siswa (Rahayu dkk., 2022). Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, lembaga pendidikan Islam di Indonesia baik yang berada di bawah naungan Kementerian Agama seperti Madrasah, maupun yang berbasis masyarakat seperti Pesantren secara regulatif turut berkewajiban mengadopsi semangat perubahan ini.

Namun, dalam tataran empiris, implementasi Kurikulum Merdeka di lingkungan

pendidikan Islam tidak serta-merta berjalan tanpa hambatan. Lembaga pendidikan Islam memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan sekolah umum, terutama pada integrasi nilai-nilai keagamaan (*tafaqquh fiddin*) dan beban muatan lokal yang relatif padat (Muhaimin, 2013). Di satu sisi, Kurikulum Merdeka membuka peluang besar bagi pendidikan Islam untuk melakukan inovasi pembelajaran. Fleksibilitas yang ditawarkan kurikulum ini memungkinkan madrasah dan pesantren untuk mengontekstualisasikan nilai-nilai moderasi beragama dan karakter Islami ke dalam struktur kurikulum tanpa terbebani oleh target capaian materi yang kaku (Kementerian Agama RI, 2022). Peluang ini melahirkan ruang bagi rekonstruksi metodologi pembelajaran Islam yang lebih dialogis, kritis, dan relevan dengan tantangan abad ke-21.

Di sisi lain, kebijakan ini sekaligus membawa tantangan besar yang bersifat sistemik. Pendidikan Islam di Indonesia dihadapkan pada disparitas kesiapan infrastruktur, keterbatasan kompetensi pedagogis guru dalam merancang asesmen diagnostik dan pembelajaran berdiferensiasi, serta benturan kultural akademis terhadap perubahan yang cepat

(Malyana, 2023). Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai potensi reduksi muatan keagamaan atau tumpang tindihnya beban belajar siswa akibat sinkronisasi antara kurikulum nasional dengan kurikulum khas pesantren atau madrasah. Ketidaksiapan dalam memitigasi tantangan ini berisiko memicu formalitas administratif belaka, di mana semangat "Merdeka Belajar" gagal menyentuh substansi transformasi kelas.

Beberapa penelitian terdahulu telah banyak mengulas implementasi Kurikulum Merdeka secara umum di sekolah dasar dan menengah. Namun, kajian yang secara khusus, komprehensif, dan kritis memetakan dialektika antara peluang dan tantangan spesifik pada lanskap pendidikan Islam di Indonesia masih memerlukan pendalaman lebih lanjut (Alim & Roslan, 2021). Kebanyakan literatur yang ada cenderung bersifat deskriptif-normatif dan belum menawarkan resolusi strategis bagi lembaga pendidikan Islam.

Oleh karena itu, artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan akademis (*gap analysis*) tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peluang strategis yang dapat dioptimalkan serta tantangan krusial yang harus dihadapi oleh pendidikan Islam di Indonesia dalam menyongsong Kurikulum Merdeka. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan sebuah formula atau rekomendasi teoretis-praktis agar lembaga pendidikan Islam tidak hanya menjadi objek kebijakan, melainkan subjek aktif yang mampu mengawinkan nilai-nilai luhur Islam dengan spirit kemerdekaan belajar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji peluang dan tantangan implementasi Kurikulum Merdeka bagi pendidikan Islam di Indonesia (Zed, 2014). Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juli 2026 berbasis studi dokumen non-fisik melalui penelusuran basis data digital seperti Google Scholar, Scopus, dan Garuda. Populasi data meliputi seluruh regulasi pemerintah, buku, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan Kurikulum Merdeka serta pendidikan Islam di Indonesia. Sampel data ditentukan secara *purposive sampling* berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, yaitu dokumen kebijakan resmi

seperti KMA No. 347 Tahun 2022 dan artikel jurnal ilmiah bereputasi terbitan lima tahun terakhir (2021–2026). Prosedur penelitian ditempuh melalui empat tahapan sistematis, yaitu pengumpulan literatur (*data collecting*), penyaringan dan klasifikasi data (*data reduction*), penyajian data secara tematis (*data display*), serta penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) (Miles et al., 2014). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) untuk membedah substansi teks regulasi dan pandangan para ahli (Krippendorff, 2018), di mana keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber data dengan mengorelasikan regulasi pemerintah dan temuan empiris literatur ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peluang Kurikulum Merdeka bagi Rekonstruksi Pendidikan Islam

Implementasi Kurikulum Merdeka memberikan ruang otonomi yang luas bagi lembaga pendidikan Islam di Indonesia untuk melakukan reorientasi filosofis dan metodologis. Dalam perspektif teori rekonstruksi kurikulum pendidikan Islam yang digagas oleh Muhaimin, sebuah kurikulum tidak boleh kaku, melainkan harus dinamis dan mampu menjembatani antara warisan nilai keagamaan (*turats*) dengan tuntutan modernitas (*tajdid*) (Muhaimin, 2014). Kurikulum Merdeka akomodatif terhadap prinsip ini melalui tiga peluang strategis:

- Kontekstualisasi Moderasi Beragama dalam P5RA: Salah satu pilar utama Kurikulum Merdeka adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Bagi pendidikan Islam di bawah Kementerian Agama, proyek ini dikembangkan menjadi P5RA (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar *Rahmatan lil 'Alamin*) (Direktorat KSKK Madrasah, 2023). Kebijakan ini merupakan peluang emas untuk menginternalisasikan nilai-nilai Islam moderat (*wasathiyah*), seperti tawasut (mengambil jalan tengah), tawazun (seimbang), dan tasamuh (toleransi) secara aplikatif melalui pembelajaran berbasis proyek, bukan sekadar hafalan doktrinal.
- Pembelajaran Berdiferensiasi yang Humanis: Karakteristik Kurikulum Merdeka yang menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi (*differentiated learning*) sejalan dengan konsep *khathibunasi 'ala*

qadri 'uqulihim (berbicaralah kepada manusia sesuai kadar kemampuan akal nya). Guru mengukur *readiness* (kesiapan) siswa melalui asesmen diagnostik, sehingga pembelajaran fikih, akidah akhlak, maupun sejarah kebudayaan Islam dapat disesuaikan dengan modalitas belajar siswa tanpa ada pemaksaan kurikuler yang seragam.

- **Fleksibilitas Integrasi Keilmuan:** Melalui pendekatan kurikulum yang fleksibel, lembaga pendidikan Islam memiliki peluang besar menerapkan paradigma integrasi-interkoneksi keilmuan. Amin Abdullah menyatakan bahwa isolasi antara ilmu agama (*sacred knowledge*) dan ilmu umum (*secular knowledge*) telah menyebabkan stagnasi berpikir umat.¹ Struktur Kurikulum Merdeka yang tidak kaku memungkinkan madrasah atau pesantren untuk mendesain pembelajaran yang mempertemukan sains modern dengan teks-teks keagamaan, misalnya mengkaji pelestarian lingkungan (sains) melalui perspektif *fiqh al-bi'ah* (fikih lingkungan).

2. Tantangan Sistemik dan Epistemologis di Lapangan

Meskipun menawarkan bentangan peluang yang visioner, dialektika implementasi Kurikulum Merdeka di lapangan dihadapkan pada realitas tantangan yang kompleks dan berlapis. Tantangan ini dapat dipetakan menjadi dua aspek utama: tantangan sosiologis-praktis dan tantangan epistemologis.

- **Disparitas Kesiapan SDM dan Infrastruktur:** Tantangan paling nyata di lingkungan pendidikan Islam khususnya madrasah swasta dan pesantren di daerah urban maupun rural adalah kesenjangan kompetensi pedagogis pendidik. Mengubah pola pikir (*mindset*) guru dari kurikulum berbasis konten (fokus menuntaskan bab buku) menjadi kurikulum berbasis kompetensi dan proses memerlukan adaptasi yang tidak sebentar. Banyak pendidik yang masih mengalami kegagapan dalam merancang modul ajar mandiri, mengoperasikan Platform Merdeka Mengajar (PMM), serta menyusun instrumen asesmen formatif yang autentik (Abdullah, 2012).
- **Karakteristik utama lembaga pendidikan Islam** adalah adanya muatan lokal keagamaan yang wajib dijaga, seperti penguasaan kitab kuning di pesantren atau pendalaman bahasa

Arab di madrasah. Ketika Kurikulum Merdeka mewajibkan alokasi waktu khusus untuk proyek—yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil 'Alamin (P5RA)—hingga 20% sampai 30%, lembaga pendidikan Islam mengalami dilema ruang dan waktu. Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022, "*Pelaksanaan P5RA dialokasikan sebesar 20-30% dari total beban belajar pertahun yang dirancang secara terpisah dari intrakurikuler.*" Sinkronisasi antara kurikulum nasional yang menuntut kemerdekaan belajar dengan beban kurikulum institusional keagamaan yang sudah sangat padat berisiko menciptakan tumpang tindih beban belajar (*overloaded curriculum*) bagi siswa jika tidak dikelola dengan manajemen kurikulum yang matang.

3. Analisis Sintesis: Menemukan Titik Temu (Sinergitas)

Jika dianalisis menggunakan pisau analisis integrasi-interkoneksi Amin Abdullah, peluang dan tantangan ini tidak boleh dilihat sebagai dua kutub yang saling menjatuhkan, melainkan sebagai jaring-jaring laba-laba (*spider web*) yang saling bertautan (Wahyuni, 2024). Pendidikan Islam tidak boleh terjebak pada romantisme masa lalu sehingga menolak Kurikulum Merdeka (sikap defensif), tetapi juga tidak boleh menelan mentah-mentah kebijakan ini tanpa filter sehingga kehilangan identitas keislamannya (sikap sekuler). Solusi epistemologis yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah melakukan Akomodasi Selektif-Inovatif. Lembaga pendidikan Islam harus memanfaatkan fleksibilitas struktur Kurikulum Merdeka untuk merampingkan materi-materi keagamaan yang bersifat repetitif, lalu mengalihkannya ke dalam bentuk proyek sosial-keagamaan yang nyata (P5RA). Dengan demikian, tantangan kepadatan materi dapat diurai, dan peluang untuk melahirkan generasi muslim yang berkarakter Pancasila serta berwawasan *Rahmatan lil 'Alamin* dapat diwujudkan secara simultan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka pada lanskap pendidikan Islam di Indonesia berada dalam pusaran dialektika antara ruang otonomi epistemologis dan hambatan struktural-praktis.

Melalui pisau analisis rekonstruksi kurikulum dan integrasi-interkoneksi, ditemukan bahwa spirit "Merdeka Belajar" memberikan peluang emas bagi reposisi metodologi pendidikan Islam yang lebih humanis dan adaptif. Kehadiran P5RA berhasil menjadi jembatan kontekstualisasi nilai moderasi beragama (*wasathiyah*) tanpa terjebak pada indoktrinasi tekstual. Kendati demikian, benturan nyata muncul ke permukaan akibat adanya disparitas kompetensi pedagogis pendidik, resistensi kultural-akademis, serta fenomena *overloaded curriculum* yang dipicu oleh padatnya muatan lokal keagamaan khas madrasah dan pesantren. Penelitian ini menawarkan resolusi berupa strategi Akomodasi Selektif-Inovatif, di mana fleksibilitas Kurikulum Merdeka harus dimanfaatkan secara berani oleh pemangku kebijakan lokal untuk merampingkan materi keagamaan yang repetitif, lalu mengalihkannya ke dalam bentuk proyek sosial-keagamaan yang aplikatif.

Kontribusi teoretis dari kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi kurikulum nasional di lingkungan keagamaan tidak ditentukan oleh seberapa ketat lembaga mematuhi aturan administratif, melainkan pada kemampuan melakukan kompromi kreatif antara tuntutan modernitas (*tajdid*) dan pelestarian tradisi (*turats*). Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena sepenuhnya bersandar pada analisis dokumen kebijakan dan literatur sekunder (*library research*), sehingga belum mampu merekam fluktuasi realitas empiris di tingkat akar rumput secara komparatif. Oleh karena itu, agenda riset mendatang perlu diarahkan pada penelitian lapangan yang bersifat evaluatif-multikasus guna menguji efektivitas model P5RA pada berbagai tipologi lembaga pendidikan Islam, baik formal maupun non-formal di Indonesia.

REFERENSI

- Abdullah, M. A. (2012). *Islamic studies di perguruan tinggi: Pendekatan integratif-interkonaktif*. Pustaka Pelajar.
- Alim, S., & Roslan, M. (2021). The politics of curriculum change in Indonesian education system. *Journal of Islamic Education Studies*, 9(2).
- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek. (2022). *Kajian akademik kurikulum untuk pemulihan pembelajaran*. Kemendikbudristek.
- Direktorat KSKK Madrasah Ditjen Pendis Kementerian Agama RI. (2023). *Panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin (P5RA) pada madrasah*. Kemenag RI.
- Fahham, A. M. (2024). Tantangan pesantren dalam menghadapi dinamika kurikulum nasional. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 15(2). <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v15i2>
- Kementerian Agama RI. (2022). *Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 347 Tahun 2022 tentang pedoman implementasi Kurikulum Merdeka pada madrasah*. Kemenag RI.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- Malyana, A. (2023). Peluang dan tantangan penerapan Kurikulum Merdeka di lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 5(2). <https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v5i2>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Muhaimin. (2013). *Rekonstruksi pendidikan Islam: Dari paradigma pengembangan, manajemen kelembagaan, kurikulum hingga strategi pembelajaran*. Rajawali Pers.
- Muhaimin. (2014). *Pengembangan kurikulum pendidikan Islam*. Rajawali Pers.
- Rahayu, R., dkk. (2022). Inovasi Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(4). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3236>
- Wahyuni, S. (2024). Problematika guru madrasah dalam mengimplementasikan asesmen pembelajaran Kurikulum Merdeka. *Jurnal Kependidikan Islam Interdisipliner*, 11(1). <https://doi.org/10.14421/jkii.v11i1>
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.